

ANALISIS KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NIKEL INDONESIA TERHADAP KOMITMEN NDC PARIS AGREEMENT TAHUN 2021-2025

NAMIRA NAZA ANDARA

ABSTRAK

Periode 2021-2025 ditandai oleh percepatan hilirisasi nikel Indonesia untuk mendukung industri kendaraan listrik global, sementara Indonesia juga berkomitmen mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam kerangka Paris Agreement. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang membuat kebijakan pertambangan nikel menjadi penghambat pencapaian target NDC Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan konsep Green Paradox. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi industri nikel yang masih bergantung pada energi berbasis batu bara, tidak adanya persyaratan dekarbonisasi yang memadai, serta ketidaksinkronan kebijakan iklim dan industrialisasi menyebabkan peningkatan emisi yang sulit dikendalikan. Faktor utama yang ditemukan meliputi Inkoherensi regulasi, fragmentasi tata kelola dan lemahnya instrumen tata kelola iklim. Temuan ini mengklasifikasikan kebijakan pertambangan nikel Indonesia periode 2021-2025 sebagai strong Green Paradox karena kerugian lingkungan yang ditimbulkan tidak diimbangi oleh mekanisme pengendalian yang efektif.

Kata Kunci: Pertambangan Nikel, NDC, Paris Agreement, Green Paradox, Hilirisasi.

ANALYSIS OF INDONESIA’S NICKEL MINING POLICY IN RELATION TO NDC COMMITMENTS UNDER THE PARIS AGREEMENT 2021-2025

NAMIRA NAZA ANDARA

ABSTRACT

The 2021-2025 period was marked by the acceleration of Indonesia’s nickel downstreaming policy to support the global electric vehicle industry, while Indonesia simultaneously committed to achieving its Nationally Determined Contribution (NDC) targets under the Paris Agreement. This study aims to analyze the factors that have made Indonesia’s nickel mining policy an obstacle to achieving its NDC targets. Using a qualitative descriptive approach and literature-based research, the study applies the Green Paradox concept as its analytical framework. The findings show that the expansion of the nickel industry, which remains heavily dependent on coal-based energy, the absence of adequate decarbonization requirements, and inconsistencies between industrial and climate policies have contributed to rising emissions. Three main factors were identified: Regulatory incoherence, governance fragmentation, and weak climate governance instruments. These findings classify Indonesia’s nickel mining policy during 2021-2025 as a strong Green Paradox, as the environmental costs generated are not offset by effective mitigating mechanisms.

Keywords: Nickel Mining, NDC, Paris Agreement, Green Paradox, Downstreaming Policy.